

**PROBLEMATIKA DAN STRATEGI DINAS PENDIDIKAN TERHADAP
KETIDAKMERATAAN TENAGA PENDIDIK**

Nita Rahmanti
Universitas Pendidikan Indonesia
Nitarahmanti2@gmail.com

ABSTRACT

The teacher is an educator who becomes an example or role model for his students, a teacher is required to educate, teach, guide, direct, train, assess and evaluate his students, being a teacher may not be easy where a teacher must have extensive knowledge, good attitude, interesting skills. However, many schools have a shortage of teachers, especially in remote areas. This is one of the factors that causes inequality in teachers because they think that being a teacher pays a small salary and has to take care of a large number of children, so they think that it is not worth what they receive (salary). being one of the causes and to become a PNS/PPPK teacher is not easy. Moreover, many people think there are unseen people or people who have definitely passed because there are insiders who become very difficult competition to pass PNS/PPPK. Based on data from the National Civil Service Agency (BKN) annually issues CPNS formations, in 2021 there will be 1,002,616 CPNS formations for PPPK teachers. Meanwhile, the number of teachers in Indonesia, according to the Ministry of Education and Culture's Dapodik data, is 3,207,995. Nevertheless, as has been explained that education in Indonesia is not evenly distributed. There are also several solutions that the government has implemented, including SPGN (National Teacher Equalization System), additional teachers through regional contracts, mobilizing teachers, hiring honorary teachers through education and zoning. This research is focused on analyzing the problems of the education office regarding the inequality of educators/teachers. the approach used is a qualitative approach to the method of literature study.

Keywords: Inequality of Teachers, Problems, Strategy of the Education Office

ABSTRAK

Guru merupakan seorang pendidik yang menjadi suatu contoh atau keteladanan bagi anak didiknya, seorang guru dituntut untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak didiknya, menjadi seorang guru mungkin tidak lah mudah dimana seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, sikap yang baik, keterampilan yang menarik. Namun banyak Sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil Hal ini menjadi salah satu factor bahwa adanya ketidakmerataan guru yang disebabkan karena menganggap bahwa menjadi guru gajinya kecil harus mengurus anak yang banyak sehingga ada pemikiran bahwa tidak sebanding dengan apa yang diterimanya (gaji) hal ini menjadi salah satu penyebabnya dan untuk menjadi seorang guru yang PNS/PPPK tidaklah mudah. Apalagi banyak orang yang beranggapan ada orang-orang ghaib atau orang yang sudah pasti lolos karena adanya orang dalam yang menjadi persaingan sangat sulit untuk lolos PNS/PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya mengeluarkan formasi CPNS, di

tahun 2021 formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara jumlah guru di Indonesia menurut data Dapodik Kemendikbud sebanyak 3.207.995. Kendati demikian, seperti yang sudah dipaparkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Serta Ada beberapa solusi yang pemerintah lakukan diantaranya SPGN (system pemeratan Guru Nasional), Penambahan Tenaga Guru Melalui Kontrak Daerah, Guru penggerak, Penerimaan guru honorer melalui disdik dan Zonasi. Penelitian ini, difokuskan pada analisis mengenai problematika Problematika dinas pendidikan terhadap ketidakmerataan tenaga pendidik/guru. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.

Kata kunci: Ketidakmerataan Guru, Problematika, Strategi Dinas Pendidikan

A. Pendahuluan

Guru merupakan seorang pendidik yang menjadi suatu contoh atau keteladanan bagi anak didiknya, seorang guru dituntut untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak didiknya, menjadi seorang guru mungkin tidak lah mudah dimana seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, sikap yang baik, keterampilan yang menarik. Namun pada saat ini banyak lulusan pendidik yang tidak mau menjadi guru, dengan berbagai alasan yang mereka punya, seperti halnya tentang susahnyanya untuk menjadi guru karena aturan-aturan yang merasa sulit, kemudian karena gaji yang dibawah rata-rata. Hal ini menjadi masalah yang menyebabkan penyebaran guru yang tidak merata, ada beberapa daerah yang kelebihan dan sebaliknya ada yang kekurangan guru. Masalah ketidakmerataan guru

tidaklah sederhana, sebab ketidakmerataan guru terkait dengan kebijakan pemerintah, pengelolaan sistim informasi kependidikan, serta pengawasan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memungkinkan terjadinya kekurangan guru di suatu daerah..

Ketidakmerataan guru dapat dibuktikan pada beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung ada beberapa sekolah yang kekurangan salah satunya ada sekolah yang terdapat 6 guru kelas 1 guru olahraga dan 1 guru PAI dengan jumlah rombongan belajar ada 7 serta dengan jumlah rata-rata siswa persatu kelas adalah 55 ke atas. Hal ini menjadi setiap kelas itu termasuk kelas gemuk dengan guru yang kurang pembelajaran menjadi tidak efektif bahkan ada satu guru yang harus bulak balik ke kelas A dan ke kelas B. Namun ada juga jumlah guru nya hanya 5 orang sedangkan kelas ada 6 rombongan belajar, guru kelas

merangkap menjadi guru PAI bahkan tidak jarang merangkap menjadi guru Olahraga. Dengan kondisi yang demikian proses pembelajaran tidak lah efektif dan guru juga menjadi kewalahan.

Ada beberapa solusi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan cara dinas Pendidikan yang menerima dan menseleksi bahkan menempatkan seorang guru di tempat yang memang kekurangan guru atau dengan adanya penerimaan P3k. dengan beberapa solusi tersebut semoga bisa menjadi solusi terbaik untuk para guru dan menyelamatkan Pendidikan karena sumber daya yang berkualitas yang berguna bagi negara, dibangun melalui pendidikan (Nurdin, 2021) dalam hal ini (Fauzi,2017) Juga menyatakan Pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran, memerlukan guru sebagai komponen utama dalam Pendidikan

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan perlu melakukan analisis dan evaluasi komprehensif terhadap penyebaran guru dengan melihat kondisi jumlah guru berdasarkan Peta kecukupan guru di daerah, mengatur pola distribusi

berdasarkan skema wilayah penyebaran guru di daerah, juga pemindahan mutasi guru PNS perlu ditekan guna mengurangi kesenjangan angka kecukupan guru PNS di daerah.

Dalam prakteknya di sekolah, terdapat kesenjangan antara guru yang berstatus PNS/ASN dengan guru honorer yang diangkat oleh sekolah demi memenuhi proses pembelajaran yang dilaksanakan. Guru diklasifikasikan menjadi dua yaitu guru yang telah diangkat menjadi PNS/ASN dan guru honorer. Sedangkan guru nondik merupakan seorang guru yang bukan lulusan dari kependidikan. Dengan kata lain guru tersebut harus mengikuti suatu program matrikulasi bernama PPG (Pendidikan Profesi Guru). Dalam pasal 15 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Hal ini juga didukung oleh pasal 10 UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru diperoleh

melalui pendidikan profesi (Handayani, 2021). Dilansir dari laman Dashboard GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru honorer berada di peringkat kedua dengan angka 22%, yaitu sebanyak 728,461 orang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada analisis mengenai problematika Problematika dinas pendidikan terhadap ketidakmerataan tenaga pendidik/guru. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pada metode penelitian ini menggunakan teori-teori dengan mengumpulkan dari berbagai bahan pustaka, mereview membaca, dan mencatat bahan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber bahan-bahan tertulis, artikel, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sumber referensi yang digunakan adalah artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian yang diteliti serta dapat dipertanggung jawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menyikapi ketidakmerataan guru menjadi bahan pertimbangan dinas Pendidikan yang seharusnya bisa mengelola ketidakmerataan guru tersebut dengan melihat atau mensurvei daerah-daerah yang memang kekurangan guru, seperti halnya berdasarkan data dari dapodik pada tahun 2022/2023 ganjil data guru ada 3.340.326 dan data peserta didik 52.876.863, kita ambil satu provinsi sebagai sampel yakni provinsi Jawa Barat dengan jumlah guru seluruhnya 468.664 belum lagi dibagi kedalam beberapa sekolah seperti TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kita ambil contoh SD dimana ada 4.453.537 siswa dan ada 193.933 guru, jumlah guru tersebut belum ke ambil sama guru bidang studi seperti PAI dan Olahraga kemudian disebar lagi kedalam 19.671 sekolah.

Berdasarkan data tersebut apakah setiap sekolah bagian guru yang merata? Serta siswa yang sesuai? Kemudian apakah setiap guru tersebut kesejahteraannya sudah terpenuhi? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan hal ini. Apakah dengan jumlah guru yang demikian sudah PNS/PPPK semua?

Tentunya tidak untuk memenuhi guru PNS/ PPPK, ada banyak guru honorer yang sedang berjuang untuk mengikuti CPNS dan CPPPK dengan berbagai seleksi serta persaingan dengan orang-orang yang memiliki orang dalam yang tidak sedikit menjadi pembicaraan pada guru honorer.

Perjuangan para guru honorer bukan hanya berjuang tentang cara mengajar disekolah akan tetapi berjuang juga untuk masa depannya yakni dengan mengikuti tes CPNS/CPPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya mengeluarkan formasi CPNS, di tahun 2021 formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara jumlah guru di Indonesia menurut data Dapodik Kemendikbud sebanyak 3.207.995. Kendati demikian, seperti yang sudah dipaparkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Sejak awal terbentuknya Indonesia, pembangunan nasional serta pendidikannya hanya berpusat di daerah Jawa. Sementara daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) terutama Indonesia bagian timur masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan dengan

layak. Hal ini sungguh miris untuk warga negara Indonesia. Untuk itu perluasan serta pemerataan akses pendidikan di daerah 3T menjadi fokus bersama untuk mencari solusi agar ketimpangan dapat segera teratasi. Maka dari itu artikel ini dibuat untuk memberikan pandangan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemerataan pendidikan, dalam hal ini pemerataan persebaran guru yang memenuhi kualifikasi guru. Pemerataan persebaran guru sebagai salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022. Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.

Berdasarkan data Lebih Lanjut, pelamar PPPK Guru yang akan untuk Prioritas 1, 2, 3 (P1, P2, P3) dan P4/umum dibuka tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022. Seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 s.d 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum pada 16 November s.d. 17 November 2022.

Bagi Prioritas I (P1) merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas, untuk P2 adalah pelamar yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagai eks Tenaga Honorer K-II (TH K-II) yang tidak termasuk dalam Prioritas I, Prioritas III (P3)

Guru non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik, sedangkan untuk Pelamar Umum (P4) adalah Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek dan/atau pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pada SSCASN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas, maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021, tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 s.d. 13 November 2022. Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linieritas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4/Pelamar Umum.

Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1, Khusus untuk pelamar P4/umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran.

Problematisa guru honorer dalam memperoleh status kepegawaian negeri yakni belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri, keadaan keuangan pemerintah yang belum memadai untuk mengangkat guru honorer menjadi guru pegawai negeri, kualifikasi pendidikan yang mana kasus dilapangan masih banyak ditemukan para guru yang sejalan dengan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. kemudian masih lemahnya komitmen dari pihak pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi guru pegawai negeri.

Penyebab

Banyak Sekolah yang kurangan guru, terutama di daerah terpencil contohnya ada beberapa

SDN di kabupaten Bandung, dengan guru yang sedikit dan siswa yang banyak, rata-rata satu kelas berjumlah 58 siswa. Berbanding terbalik dengan diperkotaan atau bahkan untuk diperkotaan itu ada yang seimbang antara guru dan jumlah siswa dikelasnya maksudnya itu satu guru dengan 20 orang siswa atau paling banyak 30 siswa, atau bahkan diperkotaan juga memiliki hal yang sama ketidakmerataan guru. Hal ini menjadi salah satu factor bahwa adanya ketidakmerataan guru yang disebabkan karena menganggap bahwa menjadi guru gajinya kecil harus mengurus anak yang banyak sehingga ada pemikiran bahwa tidak sebanding dengan apa yang diterimanya (gaji) hal ini menjadi salah satu penyebabnya dan untuk menjadi seorang guru yang PNS/PPPK tidaklah mudah. Apalagi banyak orang yang beranggapan ada orang-orang ghaib atau orang yang sudah pasti lolos karena adanya orang dalam yang menjadi persaingan sangat sulit untuk lolos PNS/PPPK

Jumlah tenaga pengajar yang sangat minim di daerah terpencil juga akan menyulitkan setiap pendidik dalam mengajar dan menjalankan tugas lainnya. Selain itu, untuk

mencari guru yang berkualitas dan siap di tempatkan dimana saja tidaklah mudah. Apalagi jika di tempatkan di daerah terpencil yang sarana prasarananya kurang memadai dan akses perjalanan yang sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa pengabdian tinggi untuk melangkah ke arah tersebut.

Solusi

Ada beberapa solusi yang pemerintah lakukan diantaranya

1. SPGN (system pemeratan Guru Nasional)
2. Penambahan Tenaga Guru Melalui Kontrak Daerah
3. Guru penggerak
4. Penerimaan guru honorer melalui disdik
5. Zonasi

Dengan adanya solusi tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk lebih meningkatkan pemerataan guru-guru, namun sangat susah untuk mencari guru yang berkualitas dan mau ditempatkan dimana saja, bahkan ada beberapa guru yang ikut CPNS/PPPK ketika sudah lolos ia ingin pindah ke sekolah yang lebih bagus atau tempat asalnya karena merasa tidak betah dan melihat sarana dan prasarana yang kurang sehingga ia

ingin Kembali. Namun hal itu sebenarnya menurut saya dikembalikan lagi kepada dalam dirinya sendiri, apakah ia sudah siap untuk mejadi guru yang professional dan siap menjadi guru untuk mencerdaskan anak bangsanya dimanapun ia berada, intinya meluruskan dulu niat ia ketika menjadi guru, dan harus siap menjalani resiko-resiko yang akan ia hadapi kedepannya.

Houle (1980) dalam Hamid & Malian (2005), profesionalisme bagi pengelola pendidikan :

1. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat
2. Harus berdasarkan atas kompetensi individual
3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi
4. Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat
5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi
6. Memiliki prinsip-prinsip kode etik
7. Memiliki sistem sanksi profesi
8. Adanya militansi individual
9. Memiliki organisasi profesi

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Guru merupakan seorang pendidik yang menjadi suatu contoh atau keteladanan bagi anak didiknya, seorang guru dituntut untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak didiknya, menjadi seorang guru mungkin tidak lah mudah dimana seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang luas, sikap yang baik, keterampilan yang menarik. Dalam hal ini ada beberapa wilayah yang kekurangan guru salah satunya di Kabupaten bandung, Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) setiap tahunnya mengeluarkan formasi CPNS, di tahun 2021 formasi CPNS untuk guru PPPK sebanyak 1.002.616. Sementara jumlah guru di Indonesia menurut data Dapodik Kemendikbud sebanyak 3.207.995. Kendati demikian, seperti yang sudah dipaparkan bahwa pendidikan di Indonesia belum merata. Namun ada beberapa solusi yang telah dilakukan diantaranya SPGN (system pemeratan Guru Nasional), Penambahan Tenaga Guru Melalui Kontrak Daerah, Guru penggerak, Penerimaan guru honorer melalui

disdik dan Zonasi. solusi tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk lebih meningkatkan pemerataan guru-guru, namun sangat susah untuk mencari guru yang berkualitas dan mau ditempatkan dimana saja, bahkan ada beberapa guru yang ikut CPNS/PPPK ketika sudah lolos ia ingin pindah ke sekolah yang lebih bagus atau tempat asal nya karena merasa tidak betah dan melihat sarana dan prasarana yang kurang sehingga ia ingin Kembali. Namun hal itu sebenarnya menurut saya dikembalikan lagi kepada dalam dirinya sendiri, apakah ia sudah siap untuk mejadi guru yang professional dan siap menjadi guru untuk mencerdaskan anak bangsanya dimanapun ia berada, intinya meluruskan dulu niat ia ketika menjadi guru, dan harus siap menjalani resiko-resiko yang akan ia hadapi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Muhammad (2019) Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang Sd Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 8 Nomor 1
Anne Podolsky, Tara Kini, Joseph Bishop,

Dan Linda Darling-Hammond (2016) Solving The Teacher Shortage How To Attract And Retain Excellent Educators. Learning Policy Institute
Citra Dewi (2018) Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Indonesian Journal Of Education And Learning Volume 1 Nomor 2 Doi: 10.31002/Ijel.V1i2.649
David J. Shernof, Suparna Sinha , Denise M. Bressler, And Lynda Ginsburg (2017) Assessing Teacher Education And Professional Development Needs For The Implementation Of Integrated Approaches To Stem Education. Shernoff Et Al. International Journal Of Stem Education (2017) 4:13 Doi 10.1186/S40594-017-0068-1
Eddy Army Prasetyo Andhika Dan Iswahyudi (2021) Strategi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Pemerataan Tenaga Pendidik Untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Biak Numfor. "Gema Kampus" lisp Yapis Biak Edisi Vol.16 No.1 Tahun 2021 P-Issn 2085-3335; E-Issn 2715-1840
Efrizal Nasution. Problematika Pendidikan Di Indonesia . Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Iain Ambon
Fauzi, H., & Syafar, D. (2017). Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar Di Yogyakarta. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(2), 162-172.

- Handayani, N. N. L., Muliastri, N. K. E., & Suardipa, I. P. (2021). Pendidikan Profesi Guru Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Profesionalisme Guru. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 2(1), 1-12.
- Leib Sutcher Linda Darling-Hammond & Desiree Carver-Thomas (2019) Understanding Teacher Shortages: An Analysis Of Teacher Supply And Demand In The United States. *Education Policy Analysis Archives. United States. Volume 27 Number 35, Issn 1068-2341*
(<http://Epaas.asu.edu/ojs/>)
- Mgs. Ahmad Wahyudi & Achmad Lutfi (2019) Analisis Reformasi Pendidikan Dalam Mewujudkan Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9 (2) Desember 2019, Issn 2088- 527x (Print) Issn 2548-7787 (Online), Doi: <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2921>
- Nanggala Agil (2022) Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 2 Open Access At <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jipp>
- Nuridin, N. (2021). Guru Honorer Dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 10-19.
- Puji Atika Rahmawati (2021) Sistem Pemerataan Guru Nasional (Spgn) Sebagai Sistem Penyebaran Guru Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendidikan Di Daerah 3t. *Seminar Nasional Inovasi Pendidikan (Snip) 2021 Dan Seminar Nasional Guidance Counseling Project (Gcp 2021) Shes: Conference Series 5 (2) (2022) 293 – 300*
- Rizky Andika Nugraha, Evi Setianingsih, Fani Widia Putri, Wahdini Rohmah Jaelani, Yessi Vichaully (2022) Problematika Guru Honorer Dan Guru Nondik Di Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6 Nomor 2*
- Siswantari (2013) Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3,*
- Syafii Ahmad (2018) Perluasan Dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3t (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2018: 153-171. Issn (Online): 2550-1038, Issn (Print): 2503-3506. Website: Journal.Unipdu.Ac.Id/Index.Php/Dirasat/Index.*
- Syarif Ginoga. (2017) Penataan Dan Pemerataan Guru Sekolah Dasar Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jps: Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Volume 02, Nomor 1*
- Thomas Joni Verawanto Aristo (2019) Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di

Kabupaten Sintang. Jurnal
Akuntabilitas Manajemen
Pendidikan Volume 7, No 1,
April 2019 (25-34)
Online: [Http://Journal.Uny.Ac.Id
/Index.Php/Jamp](http://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Jamp)

Wijayanti Wiwik , Mada Sutapa (2015)
Penataan Dan Pemerataan
Guru : Analisis Kebutuhan,
Ketersediaan, Dan Kecukupan

Guru Di Kabupaten
Purbalingga Jawa Tengah.
Teknodika, Volume 13, Nomor
1,

[https://www.bkn.go.id/bkn-minta-ppk-
instansi-validasi-ulang-data-152-803-
non-asn-tidak-sesuai-ketentuan-
pendataan/](https://www.bkn.go.id/bkn-minta-ppk-instansi-validasi-ulang-data-152-803-non-asn-tidak-sesuai-ketentuan-pendataan/)
<https://dapo.kemdikbud.go.id/guru>